DEMOKRASI PERSPEKTIF ISLAM

Syûrâ dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi di Indonesia

Japarudin, M.Si*

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri, perbincangan dan kajian tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat, telah banyak dilakukan. Berbagai perspektif dan pendekatan dalam pengkajian keduanya semakin memperkaya khasanah topik ini. Meskipun demikian, kajian ataupun artikel ini melengkapi beberapa kajian yang telah ada sebelumnya, utamanya pembahasan tentang hubungan, titik temu, perbedaan, maupun dialog antara demokrasi dalam Islam versus demokrasi produk Barat. Islam memberikan kebebasan berpendapat, dan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar dunia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam bentuk negara republik. Uniknya demokrasi di Indonesia mencoba menggabungkan antara demokrasi Barat dengan demokrasi dan kebebasan berpendapat dalam Islam. Semua warga negara berhak mengeluarkan pendapat, dan Indonesia memiliki dewan (syura). Perpaduan antara demokrasi Barat dan sistem syuro dalam Islam, merupakan fokus kajian artikel ini.

Kata kunci: Demokrasi, Syuro, Kebebasan Berpendapat

Pendahuluan

Demokrasi dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang mengandung penghargaan terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan (kebebasan berpendapat) dan persamaan hak di depan hukum. Dari hal-hal tersebut kemudian muncul istilah; *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), dan lain sebagainya. Kebebasan berpendapat bagi warga negara direalisasikan dalam partisipasi warga masyarakat terkait dengan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik, seperti pada pemilihan suara¹. Dalam system demokrasi, kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat dapat dilakukan di forum musyawarah, di muka umum dalam bentuk demonstrasi ataupun berbicara di media massa.

Berbeda dengan demokrasi yang bernuansa Barat, dalam Islam – sebagai bagian dari demokrasi belahan dunia Timur – indikator demokrasi dalam hal

kebebasan (berpendapat/berbicara) dibicarakan oleh Al-Quran dengan istilah *Syûrâ* (sistem parlemen dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata *Musyawarah*).²

Pembahasan terhadap demokrasi dan *Syûrâ*, terdapat beragam pendapat dari kalangan pemikir Muslim. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi dan *Syûrâ* memiliki nilai-nilai dan kesamaan, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa keduanya saling bertolak belakang, bahkan bertentangan. Kelompok ketiga adalah kalangan Muslim yang menyetujui adanya persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan *Syûrâ*.³

Kedudukan *Syûrâ* dalam Islam sebagai Indikator Demokrasi

Musyawarah diwajibkan dalam Islam. Islam memandang penting penyelenggaraan *Syûrâ*, yang dimulai dari keluarga, organisasi, maupun negara.⁴ komitmen umat Islam terhadap demokrasi

*Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu

tidak diragukan lagi. *Syûrâ* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Alquran. Musyawarah dalam bahasa Arab disebut dengan *Syûrâ*, paling tidak dalam Alquran sebagai kitab umat Islam menyebutkan kata tersebut dengan jelas pada QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Asy-Syura ayat 38 dan QS. Ali Imran ayat 159:

...apabila kedua orangtua (suami dan istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas kerelaan dan permusyawaratan antara mereka, maka tidak ada dosa atas mereka... (QS. Al-Baqarah ayat 233).

Contoh persoalan yang dikemukakan oleh ayat di atas, jelas dipahami berupa anjuran bagi kedua orangtua untuk bermusyawarah, dalam menentukan penyapihan anak. Jika dalam hal seperti itu saja Alquran menganjurkan untuk bermusyawarah, tentu saja musyawarah juga diperlukan menyangkut hal-hal yang lebih besar dari itu yang menyangkut kepentingan public. Intinya adalah, semua persoalan sekecil apapun dibicarakan dan dicarikan solusinya untuk mendapat keputusan yang terbaik.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Asy-Syura ayat 38)

...karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu...(QS. Ali Imran ayat 159).

Mencermati dua ayat tersebut di atas, dapat dipahami betapa pentingnya azas musyawarah dalam ajaran Islam,

karena kedudukan musyawarah sederajat dengan kedudukan mendirikan shalat. Selain itu, musyawarah bagi umat Islam terbuka pada siapa saja (sesama orang Islam QS. Asy-Syûrâ ayat 38) maupun dengan musuh-musuh Islam (QS. Ali Imran ayat 159), dan ini merupakan bagian apa yang disebut dengan Islam rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Sering terdapat kesalahan dalam literature Barat dalam memahami konsep *Syûrâ*. Arti *Syûrâ* dipahami sebagai 'konsultasi'. *Syûrâ* merupakan proses legislasi dimana badan eksekutif harus menerima keputusan badan legislative. Ini adalah ketentuan ilahi, sebab Allah telah memerintahkan Rasulullah saw untuk tidak membuat keputusan kecuali melalui *Syûrâ*. *Syûrâ* merupakan tulang punggung system politik Islam. *Syûrâ* didefinisikan sebagai proses yang melaluinya keputusan mengenai urusan public dibuat. Para sarjana Muslim kontemporer mendakwakan perlunya institusionalisasi *Syûrâ* melalui pengangkatan dewan perwakilan legislative atau parlemen. Namun dalam peranannya, lembaga legislative dalam system politik Islam ruang lingkup legislasi dibatasi oleh kaidah-kaidah '*tidak melarang berbuat baik dan tidak mendatangkan kerusakan*'.⁵

Musyawarah pada Masa Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin

Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW sangat menghargai musyawarah. Hal ini dapat di lihat dari adanya musyawarah yang membahas bagaimana semestinya kaum Muslimin memperlakukan tawanan perang Badr, dan musyawarah dalam menghadapi

perang Uhud. Musyawarah antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat terjadi untuk membahas bagaimana semestinya tawanan perang Badr diperlakukan. Pendapat yang berkembang pada saat musyawarah, di antaranya adalah tawanan perang dijadikan sandera, dan sandera tersebut ditukar dengan uang tebusan. Pendapat lain ada yang menginginkan tawanan tersebut dibunuh saja, karena mereka telah membunuh kaum Muslimin. Namun musyawarah berakhir dengan keputusan bahwa tawanan dibebaskan dengan membayar uang tebusan, dan bagi tawanan yang tidak mampu membayar tebusan akan tetapi mempunyai kemampuan membaca dan menulis, maka sebagai pengganti tebusan, tawanan tersebut mengajarkan baca tulis kepada kaum Muslim Madinah. Dari musyawarah membahas tawanan perang Badr ini, dapat dipahami dengan jelas kalau Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana kebebasan berpendapat (memberikan suara) yang terkait dengan suatu keputusan dengan kepentingan public telah dipraktikkan.

Sedangkan dalam hal perang Uhud, menjelang perang Uhud berlangsung pihak Nabi di Madinah dan kaum Quraisy di Makkah, ada dua kemungkinan dihadapi; bertahan dalam kota Madinah atau berperang di luar kota. Menyangkut persoalan ini Nabi melakukan musyawarah dengan kaum Muslim untuk menentukan pilihan. Nabi menentukan pilihan lebih baik bertahan dalam kota, namun mayoritas Muslim menghendaki berperang di luar kota. Setelah musyawarah dilakukan suara Nabi Muhammad kalah dengan suara mayoritas Muslim.

Dengan demikian hal menarik dari peristiwa Uhud tersebut adalah dalam musyawarah, suara mayoritas (suara umat Muslim) mengalahkan suara minoritas (suara Nabi Muhammad). Walaupun dalam perang Uhud tersebut umat Muslim kalah, namun strategi perang luar kota adalah keputusan musyawarah, dan harus ditanggung bersama. Disini dapat dipahami jiwa toleransi dan menghargai pendapat oranglain ditunjukkan oleh Nabi. Karena jika Nabi Muhammad adalah seorang otoriter dan 'mungkin' nabi telah mengetahui kalau perang di luar kota umat Islam akan kalah, namun nabi tetap menghargai keputusan musyawarah. Ini juga berarti betapapun kuatnya klaim dari suara minoritas atas kebenaran harus tunduk pada suara mayoritas, ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad lebih dari empat belas abad silam, jauh sebelum Amerika menggembar-gemborkan demokrasi.

Musyawarah juga telah dipraktikkan pada masa sahabat Nabi Khulafaurrasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, pergantian pimpinan umat Islam dilakukan dengan musyawarah dimana kebebasan berpendapat diberlakukan. Sebagian kaum Anshar menghendaki pemimpin berasal dari kaum Anshar sendiri, namun sebagian kaum Anshar yang lain menghendaki dan berpendapat bahwa kaum Muhajirin lebih berhak menjadi pemimpin. Dikalangan sahabat dekat, Abu Bakar menghendaki (merekomendasikan) kaum Muslim untuk memilih Umar ibn Khattab atau Abu ubadah ibn al-Jarrah. Namun suara Umar ibn Khattab atau Abu ubadah ibn al-Jarrah malah menghendaki Abu Bakar sebagai

pemimpin, sehingga Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin umat Islam yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat.⁶ Sedangkan pergantian pemimpin setelah Umar ibn Khattab, kembali praktik demokrasi diberlakukan. Karena ada enam kandidat calon pemimpin yang direkomendasikan oleh Umar ibn Khattab untuk dipilih sebagai penggantinya, yakni; Ali ibn Abi Thalib, Usman ibn Affan, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn 'Auf, Zubair ibn Awwam, Talhah ibn Ubaidillah, dan Abdullah ibn Umar. Dan terpilihlah Usman ibn Affan sebagai pengganti Umar ibn Khattab.

Persamaan dan Perbedaan Demokrasi dan *Syûrâ*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pendahuluan, bahwa berbagai pendapat dari kalangan cendekiawan Muslim terkait dengan demokrasi dan *Syûrâ*, dimana pendapat tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing mengatakan; demokrasi dan *Syûrâ* saling bertolak belakang, demokrasi dan *Syûrâ* bertentangan, dan pendapat yang menyetujui adanya persamaan dan perbedaan antara demokrasi.

Kelompok yang mendukung demokrasi diwakili oleh Ismail Suny, Abdoerfaeef, dan Jalaluddin Rahmat. Mereka menyetujui dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi (kebebasan berbicara dan partisipasi dalam mengambil keputusan menyangkut kepentingan publik, dan hak persamaan di muka hukum), namun mereka juga menolak demokrasi yang sepenuhnya menyerahkan kedaulatan berada di

tangan rakyat, kedaulatan Tuhan adalah pengganti kedaulatan rakyat. Adapun Amien Rais menyetujui bahwa *Syûrâ* dapat disebut demokrasi.

Sedangkan Nurcholis Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi Nurcholis juga melihat adanya kesesuaian antara Islam dan demokrasi.⁷ Kesesuaian tersebut berupa sama-sama mendukung azas kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai realisasi persamaan hak sebagai warga negara.

Istilah demokrasi tidak dikenal dalam kosakata politik Islam. Walaupun demikian, bukan berarti Islam tidak mengenal demokrasi. Islam menggunakan istilah *musyawarah* sebagai fondasi utama dalam kehidupan politik. Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya mempunyai keterkaitan dengan politik, yakni; istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Mengapa demikian, karena tidak mungkin sebuah musyawarah dijalankan tanpa adanya ketiga elemen tersebut. Ikut mengambil bagian secara aktif dalam proses musyawarah, untuk mengambil sebuah keputusan/kebijakan, dengan sendirinya mempunyai makna partisipasi politik yang sesungguhnya. Tidak mungkin mengadakan musyawarah tanpa adanya kehadiran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Musyawarah tidak mungkin diwujudkan tanpa tanpa adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat yang dilandasi oleh semangat persamaan.⁸

Adopsi *Syûrâ* dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang ditetapkan akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap pendapat orang lain, karena berbagai pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Demokrasi di Indonesia menggunakan sistem parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat / MPR) sebagai wadah mewakili suara/pendapat warga negara. Sebagaimana namanya, Majelis **Permusyawaratan** Rakyat, nama ini diadopsi dari kata *Syûrâ* dalam bahasa Arab. Dalam aplikasinya terdapat kesamaan antara MPR di Indonesia dengan konsep *Syûrâ*, yakni adanya keterwakilan suara rakyat sebagai partisipasi mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan public melalui parlemen.

Partisipasi kebebasan berpendapat yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat di parlemen, menjadikan MPR sebagai badan legislative dan merupakan salah satu kekuatan pemerintahan, setelah lembaga eksekutif dan yudikatif. Sebagai tiga elemen kekuatan demokrasi (legislative, eksekutif, dan yudikatif) menentukan arah dan perkembangan pemerintah di Indonesia.

Namun menurut hemat penulis, demokrasi Indonesia dengan menggunakan parlemen (lembaga legislatif), untuk mewakili suara rakyat kurang tepat adanya. Sebab, bagaimana mungkin suara rakyat Indonesia sejumlah lebih dari 200 juta penduduk hanya

diwakili oleh suatu lembaga musyawarah yang berjumlah 560 orang? Terobosan baru terkait dengan kebebasan berpendapat dalam demokrasi Indonesia, terjadi saat pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 dan satu periode setelahnya. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden saat itu, suara rakyat menentukan secara langsung pilihannya, artinya secara langsung kebebasan berpendapat guna menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan langsung ditentukan oleh warga negara, tanpa diwakili.

Namun, pemberian hak suara secara langsung oleh rakyat juga tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara langsung seperti halnya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, karena apabila semua keputusan terkait dengan kepentingan public bukannya mustahil dilaksanakan, akan tetapi hal tersebut akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Artinya dalam beberapa hal, system perwakilan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap harus dipakai. Inilah dilemma demokrasi di Indonesia.

Manfaat Syûrâ

Banyak manfaat yang dapat diambil dari *Syûrâ*, antara lain adalah:

1. Menjadi sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan, sehingga umat dapat mengambil manfaat dari kemampuan itu.
2. Melatih seseorang untuk andil dan berpartisipasi dalam pemerintahan, memperkaya pengalaman, mengasah penalaran akal selama bermusyawarah.

3. Menguatkan tekad mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
4. Menjaga agar tidak terjadi kekeliruan dan meminimalisir kemungkinan sebuah kegagalan, karena kegagalan setelah musyawarah umumnya dapat dimaklumi dan menghindarkan celaan.
5. Dapat mengungkap perilaku dan kualitas seseorang yang terlibat dan dimintai pendapat dan pertimbangan mengenai suatu persoalan.
6. Melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan member maaf, atau menciptakan stabilitas emosi.⁹

Kesimpulan

Meskipun Indonesia mengadopsi konsep *Syûrâ*, bukan berarti Indonesia menganut atau berpaham system demokrasi Islam, hanya saja system parlemen MPR merupakan adopsi dari system *Syûrâ*. MPR sebagai kekuatan ketiga setelah eksekutif dan yudikatif, merupakan lembaga yang mewakili suara warga negara. Meskipun demikian, antara *Syûrâ* dan demokrasi Indonesia (yakni system parlemen MPR) dapat dikatakan mempunyai beberapa kesamaan, dan juga mempunyai beberapa perbedaan.

Musyawarah dalam Islam musyawarah tidak boleh melanggar hak Tuhan dan Rasul-Nya. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mutlak harus berlaku dan tidak ada musyawarah.¹⁰ Dan perlu diketahui bahwa, dalam *Syûrâ*

(musyawarah) Alquran tidak memberikan penjelasan indikator dan ketetapan siapa saja orang yang diajak bermusyawarah dan bagaimana sifat mereka. Artinya semua orang mempunyai hak kebebasan berpendapat. Sedangkan demokrasi di Indonesia tidak mengenal hak Tuhan dan Rasul, hasil musyawarah adalah murni kesepakatan dari berbagai pendapat peserta musyawarah yang berorientasi pada kepentingan bersama warga negara.

Sesuai dengan tuntunan Alquran, musyawarah dilakukan dalam hal-hal yang belum ada ketetapan yang pasti dari suatu perkara menurut Alquran. Sebagai kalimat akhir tulisan tentang demokrasi dan *Syûrâ* ini, penulis mengutip perkataan Yusuf Qardhawy; 'pendapat dua orang lebih dekat kepada kebenaran, daripada pendapat satu orang'.¹¹

Referensi

¹Istilah ini terdapat pada system demokrasi parlementer seperti di Indonesia. Istilah ini dikenal juga dengan pemilihan umum, yakni pemilihan presiden ataupun pemilihan wakil rakyat di legislative.

²Pengertian musyawarah dalam bahasa Indonesia berarti 'pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan' lihat Depdiknas RI. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 768.

³Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 184.

⁴Muhammad Abed al-Jabiri. *Syura; Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003).

⁵Hassan Al-Alkim. "Islam dan Demokrasi; Saling Memperkuat Atau tidak Kompatibel" dalam Bernard Lewis, et.al. *Islam Liberalisme Demokrasi* terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm.183

⁶Kronologis peristiwa ini dapat dibaca dalam Jamal Albana. *Runtuhnya Negara Madinah, Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*, terj. Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 56 -62. Baca juga Idris

Thaha. *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 52-56.

⁷Masykuri Abdillah. *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 80-83.

⁸Afan Gafar. "Islam dan Demokrasi; Pengalaman Empiric yang Terbatas" dalam Bernard Lewis, et.al. *Islam Liberalisme Demokrasi* terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 120.

⁹Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz. *Sistem Politik Islam*, trans. Musthalah Maufur (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 53-54.

¹⁰Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 96.

¹¹Yusuf Qardhawy. *Fiqh Negara; Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syafril Halim (Jakarta: Robbani Press, 1999), hlm. 167.